

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kurangnya sarana dalam kebutuhan. Kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak mampu mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi dengan tingkat minimum yang wajar, baik dalam pengertian absolut atau menurut standar masyarakat tertentu. Menurut BPS ukuran kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok terdiri dari dua, yaitu kebutuhan makanan dan non makanan.

Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan seseorang yang kurang mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) minimum. Kemiskinan sering dikatakan suatu masalah yang kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang berkaitan. Menurut Kuncoro (2006), kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai “ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum”. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Mapaita (2014), menjelaskan bahwa prinsip kemiskinan merupakan kurangnya kemampuan penduduk untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar. Dengan demikian kemiskinan pada hakikatnya merujuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan seseorang akibat ketidakmampuannya

memenuhi kebutuhan hidup ataupun akibat ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada rakyatnya. Masyarakat dapat dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan per bulannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3 persen, didapat berdasarkan estimasi tingkat kemiskinan dengan menggunakan standar sebesar US\$6,85 PPP (*purchasing power parity*) yang disusun berdasarkan median dari garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas. BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau *Cost of Basic Needs* (CBN). Jumlah rupiah minimum perkapita yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini sebesar Rp 595.242 per bulan.

Bank Dunia memiliki 3 pendekatan atau standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global. Pertama adalah *international poverty line* untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem, yaitu sebesar US\$ 2,15 per kapita per hari. Kemudian US\$3,65 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah atau *lower-middle income*, dan US\$ 6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas atau *upper-middle income*. Ketiga garis kemiskinan ini dinyatakan dalam US\$ PPP atau *purchasing power parity*.

Tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa ditempati oleh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tingkat kemiskinan di Yogyakarta mencapai 10,83

persen, terpaut 0,36 persen dari Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan persentase 10,47 persen. Kemiskinan di Yogyakarta sebetulnya telah mengalami penurunan sebesar 0,43% pada September 2024, namun penurunan persentase kemiskinan di Yogyakarta masih berada diatas rata-rata nasional sebesar 8,7%. Berikut disajikan tabel persentase kemiskinan di Yogyakarta menurut kabupaten/kota.

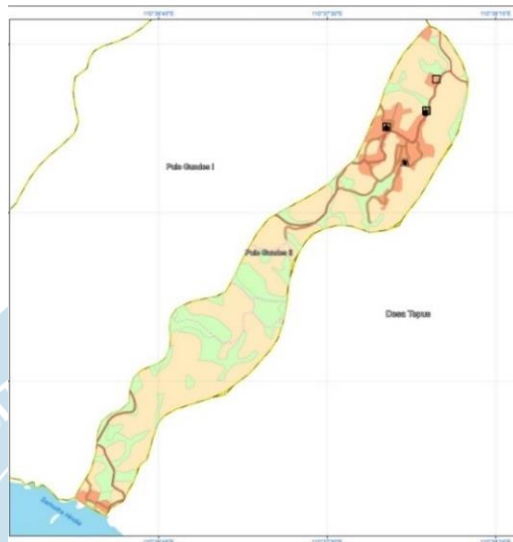
Tabel 1. 1
Persentase Kemiskinan di Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2014	20.64	15.89	20.83	9.5	8.67
2015	20.3	14.55	19.34	8.21	7.7
2016	20.3	14.55	19.34	8.21	7.7
2017	20.03	14.07	18.65	8.13	7.64
2018	18.3	13.43	17.12	7.65	6.98
2019	17.39	12.92	16.61	7.41	6.84
2020	18.01	13.5	17.07	8.12	7.27
2021	18.38	14.04	17.69	8.64	7.69
2022	16.39	12.27	15.86	7.74	6.62
2023	15.6	11.95	15.6	7.52	6.49
2024	16.2	11.66	15.18	7.46	6.26

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Provinsi Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat pada tabel, bahwa tingkat penurunan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul relatif sedikit. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengenai Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2022-2026, Gunung Kidul memiliki beberapa kecamatan atau

kapanewon yang menjadi kantong kemiskinan, seperti kecamatan Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Karangmojo dan Tepus.



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG)

Gambar 1. 1

Peta Padukuhan Pule Gundes 2, Gunung Kidul

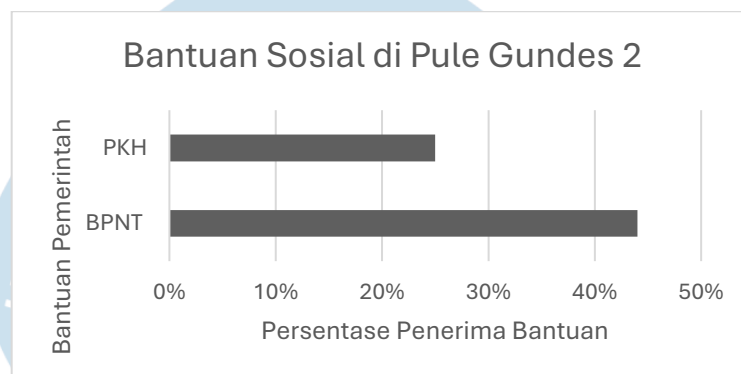
Salah satu daerah yang menghadapi tantangan kemiskinan di Kapanewon Tepus adalah Padukuhan Pule Gundes 2 terletak di Desa Sidoharjo, Kapanewon Tepus Gunung Kidul. Padukuhan Pule Gundes 2 dibatasi oleh Padukuhan Pule Gundes 1 dan Desa Tepus. Padukuhan Pule Gundes 2 terdiri dari 4 RT (Rukun Tetangga) dan 1 RW (Rukun Warga) dengan kepala keluarga berjumlah 187. Wisata yang termasuk di Padukuhan Pule Gundes 2 adalah pantai Slili, pantai Sadranan, pantai Sundak, dan pantai Ngandong. Mayoritas masyarakat di Padukuhan ini bekerja sebagai petani dan sebagian warga juga beternak seperti ayam, kambing, ataupun sapi.

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di wilayah seperti ini adalah pendapatan rumah tangga. Pendapatan dapat mengukur tingkat kemiskinan karena secara langsung pendapatan masyarakat berkaitan dengan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Semakin tinggi pendapatan keluarga, maka akan semakin tinggi pula daya beli dalam memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama terkait sumber pendapatan dan pemanfaatan potensi lokal, menjadi penting dalam upaya memahami dan mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di wilayah ini.

Pendapatan rata-rata masyarakat di padukuhan Pule Gundes 2 adalah Rp 649.733,00 per kapita. Meskipun rata-rata pendapatan tersebut berada di atas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, tidak dipungkiri terjadi sebaran pendapatan yang tidak merata. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat menarik rata-rata pendapatan ke atas. Sementara sebagian penduduk lainnya masih hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga tetap tercatat sebagai penduduk miskin.

Dalam menanggapi kemiskinan ini pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui bansos atau bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan dukungan finansial, material, atau non-material yang diberikan kepada masyarakat yang beresiko atau mengalami masalah sosial. *Asian Development Bank* (ADB) mengungkapkan bahwa perlindungan sosial

adalah sekelompok kebijakan untuk meringankan dampak dari kemiskinan serta kemelaratan penduduk sebagai dampak dari kehilangan pendapatan yang terjadi dengan meningkatkan dan memperbaiki kapasitas (Habibullah, 2019). Beberapa bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut disajikan persentase penerima bantuan di Pule Gundes 2.



Sumber: Hasil Olahan Data Survei 2025

Gambar 1. 2

Persentase Bantuan Pemerintah di Padukuhan Pule Gundes 2, Gunung Kidul

Di Padukuhan Pule Gundes 2 hampir 50% penduduk telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 25% menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Adanya bantuan pemerintah berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) mengindikasikan bahwa hampir 50% masyarakat berada di bawah atau mendekati garis kemiskinan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pule Gundes 2.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan sosial dari pemerintah dalam bentuk pangan atau non tunai (Rachman *et al.*, 2018). Bantuan ini diberikan kepada masyarakat penerima dalam bentuk uang yang harus dibelanjakan di unit-unit usaha bidang perdagangan sembako (Elektronik Warung Gotong Royong/*e-Warong*) untuk pembelian kebutuhan makanan yang terbatas. Bantuan ini telah diluncurkan mulai tahun 2017, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima bantuan melalui akses peningkatan layanan keuangan (Bappenas, 2017).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan bersyarat oleh pemerintah bagi keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat (Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2017). Dalam jangka panjang, bantuan ini bermaksud untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi di masyarakat (Suleman & Resnawaty, 2016). Program ini bertujuan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial khususnya adalah kelompok ibu hamil dan anak kecil, lanjut usia dan disabilitas sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian oleh Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa efektivitas bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan dan menurunkan angka kemiskinan diangka 5-7% per Rp 100 triliun anggaran yang dikeluarkan (Carolina & Andini, 2021).

Kemiskinan juga diduga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan demografi. Sosiologi merupakan salah satu bagian dari ilmu sosial yang berusaha menjelaskan tindakan manusia (Giddens, 2021). Sedangkan ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mengkaji mengenai kegiatan produksi,

distribusi, konsumen barang dan jasa. Secara asal kata, istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*oikonomia*”. Kata tersebut merupakan turunan dari dua kata yaitu “*oikos*” dan “*nomos*”. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* berarti aturan. Dengan demikian ekonomi dapat dikatakan mengatur aturan, kaidah, dan cara mengelola suatu rumah tangga. Variabel yang termasuk dalam kategori sosial ekonomi adalah pendidikan, pekerjaan, penghasilan, kesejahteraan, dan kepemilikan. Untuk kata demografi berasal dari kata Yunani “*demos*” artinya kependudukan dan “*graphia*” artinya deskripsi. Dengan demikian, demografi adalah tulisan mengenai kependudukan. Variabel yang termasuk demografi adalah usia, jenis kelamin, etnis, agama, status perkawinan, jumlah anak, dan tempat tinggal.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyebab kemiskinan adalah pekerjaan, jenis kelamin, rasio ketergantungan, usia, dan pendidikan. Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan setiap orang, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tugas atau kerja yang dilakukan seseorang guna mendapatkan uang. Pekerjaan bisa menjadi faktor kemiskinan rumah tangga, karena jenis pekerjaan akan menentukan seberapa besar penghasilan seseorang didapatkan. Pada penelitian Nike Roso (2014) di Kendari, menyatakan bahwa variabel pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga. Jenis kelamin perempuan atau laki-laki penting untuk menentukan sikap terhadap pekerjaan dalam rumah tangga walaupun hal ini tidak dapat digeneralisasikan. Kebanyakan masyarakat perempuan sering

dibatasi pada hal pekerjaan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin kemungkinan akan terkait dengan kemiskinan rumah tangga.

Dependency ratio atau rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator keadaan ekonomi wilayah atau keluarga secara kasar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) rasio ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk <15 tahun dan penduduk > 64 tahun). Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun disebut penduduk non produktif, karena secara ekonomis masih bergantung pada orang tua yang menanggungnya (Sulistiawati, 2021). Usia kepala keluarga secara luas juga diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan semakin tua usia seseorang, maka akan menurunkan produktivitas dan ketrampilan yang dimiliki, sehingga pendapatan yang dihasilkan menurun.

Pendidikan juga termasuk penyebab kemiskinan dalam aspek mikro. Pendidikan yang tinggi akan menghasilkan ketrampilan dan pemahaman yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut UU No. 20 Tahun 2023 pendidikan adalah “usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Dalam penelitian Yufi Halimah (2012) menyatakan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka berikut adalah rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?
2. Bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?
3. Bagaimana pengaruh jenis pekerjaan kepala keluarga terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?
4. Bagaimana pengaruh jenis kelamin kepala keluarga terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?
5. Bagaimana pengaruh rasio ketergantungan terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?
6. Bagaimana pengaruh usia kepala keluarga terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?
7. Bagaimana pengaruh pendidikan kepala keluarga terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jenis pekerjaan kepala keluarga terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jenis kelamin kepala keluarga terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio ketergantungan terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh usia kepala keluarga terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan kepala keluarga terhadap pendapatan di Pule Gundes 2?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak seperti:

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pemahaman dan ilmu baru, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi peneliti lain untuk dikembangkan menjadi lebih baik dan lebih spesifik.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah guna menciptakan kebijakan-kebijakan terkait, terutama mengenai bantuan sosial masyarakat agar dapat menekan angka kemiskinan.

4. Untuk masyarakat Padukuhan Pule Gundes 2, diharapkan penelitian ini mampu menjadi wawasan untuk sedikit menekan angka kemiskinan.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan acuan pada dasar pemikiran teoritis dan studi terkait, maka hipotesis yang hendak dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Diduga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki pengaruh terhadap pendapatan di Pule Gundes 2.
2. Diduga Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki pengaruh terhadap pendapatan di Pule Gundes 2.
3. Diduga jenis pekerjaan kepala keluarga memiliki pengaruh terhadap pendapatan di Pule Gundes 2.
4. Diduga jenis kelamin kepala keluarga memiliki pengaruh terhadap pendapatan di Pule Gundes 2.
5. Diduga rasio ketergantungan memiliki pengaruh terhadap pendapatan di Pule Gundes 2.
6. Diduga usia kepala keluarga memiliki pengaruh terhadap pendapatan di Pule Gundes 2.
7. Diduga pendidikan kepala keluarga memiliki pengaruh terhadap pendapatan di Pule Gundes 2.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam penelitian ini pendahuluan merupakan landasan awal dalam kerangka berpikir. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh bantuan pemerintah berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Sosial Demografi dan Ekonomi berupa jenis pekerjaan kepala keluarga, jenis kelamin kepala keluarga, rasio ketergantungan, usia kepala keluarga, dan pendidikan kepala keluarga terhadap pendapatan, serta studi-studi kasus terdahulu mengenai penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, variabel-variabel dalam penelitian, serta metode dan alat analisis untuk pengolahan data yang diteliti.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil analisis data yang telah diolah dan hasil interpretasi dari data yang telah dianalisis.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan keseluruhan pembahasan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan baik untuk pemerintah maupun penelitian selanjutnya.

